

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya terdapat beberapa kesimpulan antara lain :

1. Perawatan dan perbaikan alat uji di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya masih belum dilaksanakan secara periodik dan masih belum tersedianya tenaga teknis khusus perawatan dan perbaikan alat uji.
2. Kapasitas lahan parkir yang ada masih belum mampu menampung KBWU yang melakukan pengujian setiap harinya..
3. Pemanfaatan loket *Drive Thru* belum optimal karena tidak semua jenis kendaraan masuk dalam pelayanan *Drive Thru*.
4. Tata letak lorong uji terletak di awal yang berdampak bagi kendaraan mengalami kesulitan saat masuk gedung uji sehingga kendaraan yang panjang tidak dapat lurus bahkan berpeluang roda kendaraan akan terperosok ke dalam kolong uji.
5. Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKB Pengujian Sarana Tandes masih belum terintegrasi dengan Jembatan Timbang atau Terminal di wilayah Provinsi Jawa Timur.
6. Pengujian tandes hingga saat ini masih memakai buku uji, dengan buku uji ini belum dapat dilakukan pengecekan secara cepat berbasis IT.
7. Pada analisis penilaian kinerja unsur administrasi pada Seksi Pengujian Sarana Tandes dengan mengacu pada 7 indikator telah mendapatkan nilai 89,28. Kemudian pada analisis penilaian kinerja unsur teknis Seksi Pengujian Sarana Tandes dengan mengacu pada 10 indikator telah mendapatkan nilai 87,50. Dari kedua penilaian tersebut dengan menggunakan pengolahan data Skala Likert dapat dijadikan rata – rata dengan nilai 88,38 yang berpredikat "Sangat Baik".

B. Saran

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang baik, perlu dilakukan optimalisasi pada Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Adapun konsep optimalisasi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Agar kondisi alat uji tetap bekerja optimal kami menyarankan dalam pemeliharaan dan perawatan alat uji pihak Seksi pengujian Sarana Tandes agar membuat agenda atau jadwal untuk perawatan alat uji secara periodik serta penambahan petugas teknis dalam perawatan dan pemeliharaan alat uji.
2. Agar penumpukan kendaraan tidak terjadi maka kami menyarankan pihak Seksi Pengujian Sarana Tandes dapat menyediakan lahan parkir yang sesuai dengan kebutuhan yang di uji.
3. Agar pelaksanaan *Drive Thru* dalam proses pelayanan administrasi lebih maksimal maka kami menyarankan pihak Seksi Pengujian Sarana Tandes untuk mengkaji ulang sistem *Drive Thru* sebagai solusi dalam pelayanan administrasi yang efektif dan efisien serta semua jenis kendaraan dapat dilayani unsur administrasi di dalam Drive Thru
4. Sebaiknya tata letak kolong uji ditempatkan di ujung belakang dalam pemeriksaan teknis kendaraan sehingga kendaraan tidak mengalami kesulitan untuk meluruskan dengan kolong uji serta guna menganalisa hasil akhir pengujian kendaraan dalam pemeriksaan teknis kendaraan bermotor.
5. Dalam meningkatkan kualitas Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKB Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya kami menyarankan agar berkoordinasi dengan Jembatan Timbang atau Terminal di wilayah Provinsi Jawa Timur agar dalam menangani kasus permasalahan kendaraan seperti *Overdimensi* atau *Overload* dapat ditangani secara optimal.
6. Agar dalam pelayanan pengujian lebih maksimal kami menyarankan pihak Seksi Pengujian Sarana Tandes untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait penyelenggaraan *smart card* dan peraturan walikota terkait penyelenggaraan *smart card* atau kartu pintar yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 133 Tahun 2015 Pasal 67 sehingga

dalam pelayanan publik dapat mempercepat proses pengecekan data kendaraan.

7. Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya sudah terakreditasi B, oleh karena itu agar dapat dipertahankan dan tingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
- , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang **Pelayanan Publik**;
- , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang **Kendaraan**;
- , Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 Tentang **Pengujian Kendaraan Bermotor**;
- , Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang **Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**;
- , Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: A.1080.UM.107/2/1991 tanggal 31 Oktober tentang tentang **Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor**;
- , Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**;
- , Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2006 Tentang **Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Lama**;
- , Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang **Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor**;
- , Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 30 Maret 2017 Tentang **Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor** ;
- , Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : A.1080.UM.107/2/1991 tanggal 31 Oktober Tentang **Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor**;
- , Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 Tentang **Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya**;
- , Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 Tentang **Tata Cara Pelayanan Pengujian** Sugiono, 2012. Metode Penelitian

Pedoman Praktek Kerja Profesi (PKP) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2019;

Budiantoro, Zarot dkk., 2017. Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor pada Unit pelaksana PKB Kabupaten trenggalek;

Aditama, Aksa dan Sri Mulyati., 2018. Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor pada Unit pelaksana PKB Kabupaten Bogor.

